

Modal Politik sebagai Instrumen Keterlibatan Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Pemerintahan Joko Widodo 2019–2024

Alvie Fernandy¹, Cecep Hidayat²

^{1,2} Universitas Indonesia

Email: alvie.fernandy@ui.ac.id, cecep.hidayat@ui.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas Joko Widodo sebagai elite sipil yang membutuhkan kekuatan politik dengan didapatkan melalui purnawirawan Tentara Nasional Indonesia yang memiliki berbagai modal dari lintas dimensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas transformasi sumber daya atau modal yang dimiliki oleh purnawirawan Tentara Nasional Indonesia menjadi instrumen dalam keterlibatan mereka di pemerintahan Jokowi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data studi literatur. Penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena keterlibatan purnawirawan Tentara Nasional Indonesia dalam Kabinet Indonesia Maju 2019–2024 dapat diukur melalui sebagian dimensi dari *political capital theory* yang diajukan oleh Kimberly L. Casey. Berdasarkan pengukuran yang diajukan oleh Casey, hasil penelitian menunjukkan bahwa semua purnawirawan Tentara Nasional Indonesia yang menjadi subjek penelitian memiliki nilai positif atau tidak ada yang menunjukkan skor akhir negatif. Dalam artian, fenomena keterlibatan purnawirawan Tentara Nasional Indonesia dalam Kabinet Indonesia Maju (pemerintahan Jokowi 2019–2024) sebagai arena politik didukung oleh modal politik mereka sebagai instrumen yang membantu kebutuhan Jokowi dalam meningkatkan daya tawar sebagai politisi sipil.

Kata Kunci: elite, Joko Widodo, modal politik, pasar politik, purnawirawan TNI

ABSTRACT

This study discusses Joko Widodo as a civilian elite who needs political power obtained through Indonesian National Army retirees who have various capital from across dimensions. This study aims to review the transformation of resources or capital owned by Indonesian National Army retirees into instruments in their involvement in Jokowi's government. This study uses a qualitative approach with a literature study data collection method. This study shows that the phenomenon of Indonesian National Army retiree involvement in the 2019–2024 Advanced Indonesia Cabinet can be measured through some dimensions of the political capital theory proposed by Kimberly L. Casey. Based on the measurements proposed by Casey, the results of the study show that all Indonesian National Army retirees who are the subjects of the study have positive values or none show a negative final score. In other words, the phenomenon of Indonesian National Army retiree involvement in the Kabinet Indonesia Maju (Jokowi's government 2019–2024) as a political arena is supported by their political capital as an instrument that helps Jokowi's needs in increasing bargaining as a civilian politician.

Keywords: elites, Joko Widodo, military retiree, political capital, political market

PENDAHULUAN

Setelah reformasi, terdapat larangan bagi para anggota Tentara Nasional Indonesia yang masih aktif berdinasi untuk masuk ke ranah politik. Berbeda jika dibandingkan dengan yang sudah pensiun, purnawirawan tentara masih diperbolehkan untuk menjabat di area politik karena mereka sudah termasuk sebagai warga sipil. Purnawirawan militer¹ merupakan entitas yang heterogen karena tidak semua pensiunan militer masuk ke dalam pusaran kuasa pemerintahan setelah menanggalkan masa dinas. Di antara kelanjutan kariernya yang heterogen, identitasnya sebagai militer yang mempunyai kekuatan politik pada akhirnya membuat status purnawirawan menjadi homogen. Perwira militer, baik melalui pengangkatan maupun pemilihan setelah pensiun, tetap menjadi kekuatan politik yang tidak dapat diabaikan—apalagi ketika masuk ke dalam pemerintahan (Xu, 2021).

Motif dari purnawirawan TNI untuk tetap berkontribusi dalam ranah politik dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu motif ideologis dan pragmatis. Secara ideologis, para purnawirawan masuk ke kancah politik karena ingin tetap berkontribusi untuk negara walaupun masa dinas telah berakhir, sedangkan secara pragmatis, ada semacam perasaan belum puas akan kekuasaan atau gejala *post-power syndrome* yang melatarbelakanginya (Soesilo, 2014). Walaupun purnawirawan memiliki organisasi yang mengakomodasi kepentingan mereka, tetapi penelitian ini akan membahas posisi mereka secara perseorangan. Dalam artian, aktor-aktor yang dilibatkan memiliki berbagai kelebihan yang dibutuhkan oleh elite sipil. Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa hal; lemahnya institusi sipil, tidak kompetennya elite sipil politik, dan masih terdapat perpecahan di antara elite sipil politik yang membuat para pensiunan militer tetap digunakan sebagai kekuatan politik (lihat Mietzner, 2006).

Walaupun secara perorangan, purnawirawan TNI yang terlibat dalam pemerintahan merupakan tokoh-tokoh yang memiliki modal sosial, ekonomi, dan politik yang kuat. Secara tegas, penelitian ini akan mendefinisikan purnawirawan

¹ Peneliti menggunakan istilah “tentara” dan “militer” secara bergiliran dengan merujuk pada satu makna yang sama, yaitu tentara.

militer sebagai aktor sipil yang memiliki latar belakang TNI sebagai salah satu faktor yang mendukung keterlibatan mereka dalam pemerintahan. Purnawirawan TNI memang memiliki organisasi yang mengakomodasi kepentingan mereka, seperti PEPABRI (Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri). Namun, purnawirawan yang dimaksud dalam penelitian ini selanjutnya adalah mereka yang; *pertama*, menduduki posisi perwira tinggi ketika masih aktif berdinis sampai pensiun, atau *kedua*, memiliki modal politik yang dilihat dari keterlibatan mereka dalam partai politik dan kedekatan personal terhadap elite sipil, atau *ketiga*, memiliki modal ekonomi yang dilihat dari jumlah kekayaan pribadi. Khususnya, purnawirawan sebagai subjek penelitian ini merujuk pada mereka yang menduduki jabatan di Kabinet Indonesia Maju.

Tabel 1.1. Purnawirawan TNI dalam Kabinet Indonesia Maju 2019–2024

Nama (Akronim/Singkatan)	Jabatan
Luhut Binsar Pandjaitan (LBP)	Menko Kemaritiman dan Investasi 2019–2024
Moeldoko (MD)	Kepala Staf Presiden 2019–2024
Fachrul Razi (FR)	Menteri Agama 2019–2020
Prabowo Subianto (PS)	Menteri Pertahanan 2019–2024
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)	Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 2024
Hadi Tjahjanto (HT)	Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 2022–2024
Terawan Agus Putranto (TAP)	Menteri Kesehatan 2019–2020

Sumber: diolah oleh Peneliti, 2025.

Berdasarkan **Tabel 1.1**, dapat dilihat bahwa Joko Widodo (selanjutnya disebut sebagai Jokowi) dalam periode kedua pemerintahannya masih mengandalkan pensiunan TNI untuk membantu pemerintahannya. Keterlibatan purnawirawan TNI dalam Kabinet Indonesia Maju 2019–2024 sekitar 20% dari 38 kursi. Jika dibandingkan dengan periode pertama, Kabinet Kerja 2014–2019, memiliki 11,8% dari 34 kursi kabinet keterlibatan purnawirawan TNI. Jika

dibandingkan dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Kabinet Indonesia Bersatu 2004–2009 memiliki 11,8% dari 34 kursi keterlibatan purnawirawan di pemerintahan dan 14,7% dari 34 kursi pada Kabinet Indonesia Bersatu II 2009–2014. Persentase keterlibatan tersebut hanya diukur dari posisi menteri saja, di luar dari keterlibatan mereka dalam posisi lain yang setingkat menteri, seperti Kepala Staf Presiden (KSP) dan posisi politis lain, seperti Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Berdasarkan latar belakangnya dan kondisi politik saat dirinya menjabat sebagai presiden, Jokowi dihadapkan dengan situasi yang mengharuskannya untuk memiliki *bargain* agar stabilitas politik tetap terjaga (Solihah *et. al*, 2019; Mietzner, 2018; Sebastian *et. al*, 2018; Xu, 2021; & Sambhi, 2021). Pada akhirnya, Jokowi merangkul kekuatan tradisional, yaitu militer melalui pengangkatan pensiunan perwira ke dalam pemerintahan. Jokowi bukanlah sosok dengan kekuatan di bidang militer; beliau berasal dari kalangan akar rumput yang memulai karier sebagai pengusaha sebelum beralih menjadi politisi dan kemudian menjabat sebagai walikota. Konsekuensinya adalah Jokowi dianggap sebagai “pendatang baru” dan memiliki *power* yang lemah ketika memasuki lingkungan yang dipenuhi oleh dua unsur tadi; militer dan politisi (Sambhi, 2021; Muhtadi, 2015). Posisi politis kepresidenan Jokowi membuat dirinya menyimpulkan bahwa "*tanpa dukungan militer, kekuasaannya bisa terancam*," (Mietzner, 2018).

Jokowi sebagai elite sipil membutuhkan kekuatan militer yang didapatkan melalui purnawirawan TNI dengan berbagai modal yang dimilikinya. Selain memiliki berbagai modal, purnawirawan TNI yang dilibatkan dalam kabinet juga berkontribusi dalam kemenangan Jokowi pada pemilihan presiden. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas berbagai sumber daya atau modal yang dimiliki oleh purnawirawan TNI yang menjadikannya sebagai instrumen dalam keterlibatan mereka di pemerintahan Jokowi yang merupakan politisi dari unsur sipil. Pelibatan purnawirawan TNI dengan kepemilikan modal atau sumber daya dari berbagai dimensi kemudian menjadi salah satu kekuatan politik pemerintahan Jokowi yang salah satu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan Jokowi, yaitu menciptakan stabilitas politik. Tujuan tersebut berangkat dari pertanyaan "*bagaimana masing-*

masing dimensi modal politik memengaruhi peluang posisi purnawirawan TNI di Kabinet Indonesia Maju?”.

KAJIAN PUSTAKA

Political Capital Theory

Teori *political capital* (modal politik) merupakan pengembangan dari teori modal (*capital theory*) milik Pierre Bourdieu yang masih berada di tataran abstrak. Teori ini dikembangkan oleh Kimberly Casey dengan tulisan utamanya yang berjudul “Defining Political Capital: A Reconsideration of Bourdieu’s Interconvertibility Theory” pada tahun 2005.

Apabila berbicara mengenai modal, maka erat hubungannya dengan produksi dan pasar. Dalam konteks modal politik, produksi dapat diidentifikasi sebagai proses agregasi aktif. Dengan asumsi aktor secara aktif mengejar hasil politik setelah berbagai sumber daya diagregasikan, kemudian hal tersebut bertransformasi menjadi sumber daya politik yang dipertukarkan di pasar (Casey, 2005).

Terdapat tujuh dimensi yang menyediakan pengukuran sumber daya untuk modal politik, yaitu modal kelembagaan, modal manusia, modal sosial, modal ekonomi, modal budaya, modal simbolik, dan modal moral. (1) Modal kelembagaan merupakan modal yang terkait dengan identifikasi dan asosiasi ideologi dan kekuasaan yang berlaku, seperti melalui kontribusi dukungan partai politik. (2) Modal manusia sebagai sumber daya politik didefinisikan sebagai kombinasi kemampuan dan keterampilan, pengalaman, baik politik maupun non-politik, dan pendidikan. (3) Modal sosial merupakan modal yang didapatkan dari hubungan sosial melalui dukungan kelompok kolektif, ikatan pribadi, dan *name recognition*. (4) Modal ekonomi adalah kekayaan yang dimiliki secara pribadi. (5) Modal budaya merupakan identifikasi kepentingan seorang aktor politik dengan budaya pasar politiknya. (6) Modal simbolik merupakan atribut gelar dan prestise pendidikan yang dimiliki. (7) Modal moral berkaitan erat dengan politik formal dan perilaku politik (Casey, 2005).

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah dengan metode kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri merupakan sebuah model pendekatan yang memiliki fungsi untuk menelaah serta menjelaskan makna dari peristiwa sosial tertentu dengan melibatkan partisipan, analisis induktif, dan pengelolaan data yang berasal dari sumber spesifik menjadi tema umum (Creswell, 2014). Kemudian, penelitian ini akan menggunakan tipe penelitian eksplanatif atau *explanatory research*. Menurut Kumar (2014), penelitian eksplanatif merupakan bentuk penelitian yang menjelaskan hubungan antara dua variabel yang memiliki kaitan atau hubungan kausal (sebab-akibat). Melalui tipe penelitian ini, peneliti dapat mengetahui hubungan sebab akibat antara modal politik yang dimiliki oleh subjek purnawirawan terhadap keterlibatannya dalam Kabinet Indonesia Maju. Pada mekanisme pengumpulan data, penelitian akan dikaji melalui studi literatur pada beberapa sumber bacaan dalam bentuk buku, laporan, dan artikel jurnal. Data tersebut didapatkan melalui analisis dokumen resmi, artikel jurnal, laporan penelitian, dan hasil investigasi yang mewawancarai tokoh terkait hubungan sipil militer.

Di antara ketujuh dimensi modal politik, terdapat beberapa dimensi yang pengukurannya dilakukan secara subjektif melalui himpunan dari opini-opini di luar aktor politik yang bersangkutan dan ada juga yang dapat diukur secara objektif melalui data empiris². Berikut merupakan berbagai dimensi modal dengan tabel *scoring index* dan kriteria pengukuran turunan secara objektif yang akan menjadi metode pengukuran dalam penelitian ini:

² Ketujuh dimensi tersebut memiliki kriteria turunan dalam melakukan pengukuran, seperti modal kelembagaan yang diukur melalui kontribusi dukungan partai terhadap aktor, posisi ideologi partai, dan keuntungan yang dimiliki partai. Di antara berbagai kriteria turunan yang berangkat dari ketujuh dimensi tersebut, pengukuran dilakukan melalui dua metode, yaitu ada beberapa kriteria turunan yang diukur melalui *opinion-based standard* dan ada yang diukur melalui *empirically-based*.

Tabel 1.2 Dimensi dan Kriteria Penilaian Modal Politik

No.	Dimensi Modal	Kriteria Pengukuran	Scoring Index
1.	Modal Manusia	Pengalaman politik ³	(+2) Jabatan setingkat Menteri (+1) Jabatan eksekutif regional (0) Jabatan politik elektif (-1) Pengalaman politik elektif (-2) Tidak memiliki pengalaman politik sebelumnya
		Pendidikan	(+2) Lulusan lebih dari sarjana (+1) Lulusan setingkat sarjana (0) Lulusan terbaik AKMIL (-1) Pendidikan informal (-2) Hanya lulusan AKMIL
2.	Modal Sosial	Dukungan kelompok kolektif ⁴	(+2) Ketua (+1) Dewan Non-Struktural (0) Posisi struktural (-1) Anggota biasa (-2) Tidak terafiliasi partai
3.	Modal Ekonomi	Kekayaan pribadi ⁵	(+2) Di atas 100 Miliar (+1) 10–100 Miliar (0) 1–10 Miliar (-1) 100 Juta–1 Miliar (-2) 0–100 Juta
4.	Modal Simbolik	Jabatan atau gelar dalam karier	(+2) Setingkat Jenderal (+1) Setingkat Letnan Jenderal (0) Setingkat Mayor Jenderal (-1) Setingkat Brigadir Jenderal (-2) Perwira menengah

Sumber: Casey (2005) diolah oleh peneliti, 2025.

³ Pengukuran objektif dalam kriteria ini disesuaikan dengan konteks penelitian yang membahas mengenai jabatan setingkat Menteri.

⁴ Pengukuran objektif dalam kriteria ini dapat ditafsirkan melalui pengukuran berdasarkan posisi dalam partai politik.

⁵ Pengukuran melalui IDR merupakan konversi dengan nilai wajar dari USD

HASIL DAN PEMBAHASAN

***Political Capital* Purnawirawan TNI**

Bagian ini akan menelaah modal politik yang dimiliki oleh purnawirawan TNI yang tercantum dalam **Tabel 1.1** menggunakan pengukuran modal politik yang terbangun dari berbagai dimensi yang telah tercantum dalam **Tabel 1.2**.

1. Modal Manusia

a. Pengalaman Politik

Dari kriteria pengukuran ini, LBP dan MD memiliki rekam jejak jabatan yang setara sebelum diangkat kembali menjadi menteri oleh Jokowi dalam Kabinet Indonesia Maju. Sebelumnya, LBP dan MD memiliki posisi jabatan yang sama, yaitu Kepala Staf Presiden. LBP menjabat pada periode 2014–2015, sedangkan MD pada periode 2018–2019 (Shamsudin *et al.*, 2021). Oleh sebab itu, LBP dan MD masing-masing mendapatkan skor **+2** untuk pengukuran pengalaman politik. Berbeda dengan PS dan AHY yang masing-masing mendapatkan skor **-1** karena PS dan AHY sama-sama hanya memiliki pengalaman politik elektif. PS merupakan calon presiden dalam dua kali pilpres dan calon wakil presiden dalam satu kali pilpres, sedangkan AHY pernah mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada Pilgub 2017 (Ananta *et al.*, 2005; Setijadi *et al.*, 2016). Untuk FR, HT, dan TAP, mereka lebih banyak menghabiskan waktu mengisi jabatan profesional; seperti FR yang menjadi komisaris di PT Aneka Tambang dan PT Toba Sejahtera, HT yang masih aktif di militer, dan TAP yang menjadi Ketua Tim Dokter Kepresidenan RI 2009–2019 (Fajri *et al.*, 2024; Greenpeace Indonesia *et al.*, 2018). Oleh sebab itu, masing-masing dari mereka mendapatkan skor **-2** dalam pengukuran pengalaman politik.

b. Pendidikan

Dalam kriteria pengukuran pendidikan, keenam subjek penelitian ini—kecuali PS—mendapatkan skor **+2** karena masing-masing dari mereka merupakan lulusan lebih dari sarjana sebelum diangkat menjadi

menteri dalam Kabinet Indonesia Maju. Setelah dari kemiliteran, LBP melanjutkan studi di National Defense University, Amerika Serikat pada 1990 dan Magister Administrasi Publik di George Washington University pada 1991 (Rastika, 2015). MD juga menyelesaikan studi luar kemiliteran, yaitu program sarjana Ilmu Politik di Universitas Terbuka pada tahun 1981 dan program magister Ilmu Administrasi Publik di FISIP Universitas Indonesia pada tahun 1985 yang dilanjutkan dengan mengambil program doktoral di FISIP UI pada tahun 2014 (Yanuaris *et al.*, 2021; Erianto, 2021). Berbeda studi dengan MD, FR setelah lulus dari kemiliteran merengkuh gelar Sarjana Ilmu Politik dari Universitas Terbuka pada 1995, kemudian ditambah gelar Sarjana Hukum dan Magister Hukum dari Perguruan Tinggi Hukum Militer pada 1997 dan 2002 (Syahban & Hutasoit, 2020).

Setingkat dengan subjek penelitian yang lainnya, AHY, HT dan TAP juga pernah menyelesaikan studi dengan tingkatan di atas sarjana. Studi terakhir yang diselesaikan oleh AHY berdasarkan laman resmi biografinya adalah Master of Arts in Leadership and Management di George Herbert Walker School of Business and Technology, Webster University, Amerika Serikat pada 2015. Untuk HT, dirinya lulus dari Program Pascasarjana Magister Manajemen di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma TA 2017/2018 konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia (Rosa, 2024). Untuk TAP, dirinya merupakan profesor kehormatan ilmu pertahanan bidang kedokteran militer dari Fakultas Kedokteran Militer Universitas Pertahanan yang diangkat pada 2022 (Anggraini & Hardiyanto, 2019). Berbeda dari keenam subjek sebelumnya, PS tidak pernah mengikuti dan atau menyelesaikan studi luar militer yang menjadikan dirinya mendapatkan skor -2 dalam kriteria pengukuran pendidikan. PS hanya mengikuti pendidikan informal saja, seperti Counter Terrorist Course dengan satuan GSG-9 Germany pada 1981 dan Special Forces Officer Course di Fort Benning, Amerika Serikat pada 1981 (Savitri, 2024).

2. Modal Sosial

Namun, untuk kriteria pengukuran dukungan kelompok kolektif, PS dan AHY masing-masing mendapatkan skor +2 karena merupakan ketua dari salah satu partai politik. PS menjadi Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sejak 2015 hingga sekarang, sedangkan AHY melanjutkan kiprah politik ayahnya menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020–2025 (Adytyas *et al.*, 2018; Hasibuan & Pasha, 2024). Berbeda dengan mereka berdua, LBP dan MD, mendapatkan skor +1 karena memiliki posisi dewan non-struktural di partai politik. LBP menjadi Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar 2016–2019 dan MD menjadi Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Hanura pada 2016 (Retaduari, 2016; Sutrisno, 2018). Memiliki kesamaan partai dengan MD tetapi berbeda posisi, FR pernah menjadi Wakil Ketua Umum sekaligus Ketua Bidang di Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura (Yuniarto, 2022). Oleh sebab itu, FR mendapatkan skor 0 karena memiliki posisi kuat struktural dalam partai politik. Untuk HT dan TAP, kedua subjek tersebut merupakan menteri independen yang tidak terikat secara institusional dengan salah satu partai politik. Dengan demikian, HT dan TAP masing-masing mendapatkan skor -2.

3. Modal Ekonomi

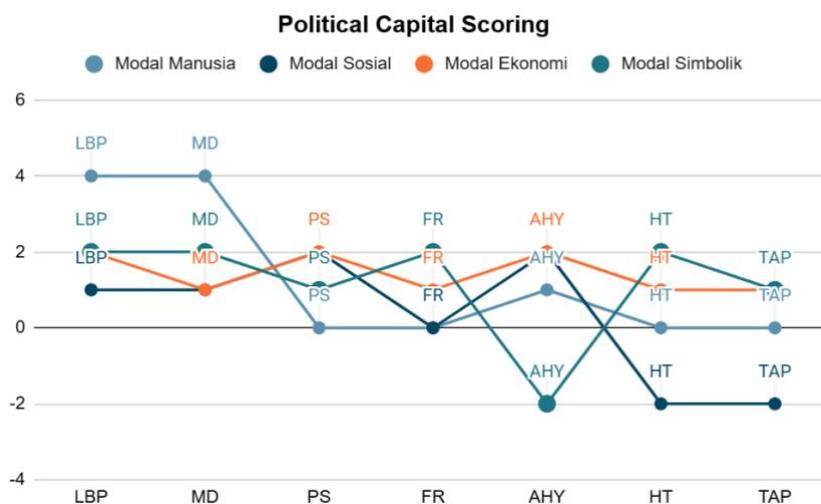
Untuk kriteria pengukuran kekayaan pribadi, LBP, PS, dan AHY masing-masing mendapatkan skor +2, sedangkan MD, FR, HT, dan TAP masing-masing memiliki skor +1. Berdasarkan laman e-LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), LBP memiliki total kekayaan senilai Rp.655.438.752.423 (baca: **Rp655 Miliar**), sedangkan PS memiliki jumlah kekayaan Rp2.005.956.560.835 (baca: **Rp2 Triliun**), dan AHY senilai Rp116.530.289.450 (baca: **Rp116 Miliar**). Kemudian, untuk MD, dirinya memiliki jumlah kekayaan senilai Rp49.556.346.849 (baca: **Rp49 Miliar**), FR senilai Rp25.993.888.352 (baca: **Rp25 Miliar**), HT senilai Rp24.213.003.580 (baca: **Rp24 Miliar**), dan TAP senilai Rp90.605.948.595 (baca: **Rp90 Miliar**). Semua laporan yang tercantum dalam e-LHKPN diambil dari awal masing-masing mereka sebelum dilantik menjadi menteri dalam Kabinet Indonesia Maju. Pembuktian harta kekayaan

masing-masing subjek penelitian dilakukan melalui e-LHKPN karena sumber tersebut merupakan indeks yang bersifat objektif tanpa adanya dugaan dan tuduhan mengenai harta yang disembunyikan.

4. Modal Simbolik

Untuk kriteria pengukuran jabatan atau gelar dalam karier militer, LBP, MD, FR, dan HT masing-masing mendapatkan skor +2, sedangkan PS dan TAP mendapatkan skor +1, dan AHY dengan skor -2. LBP menyandang gelar Jenderal (HOR) pada tahun 2000 yang diberikan oleh mantan presiden Abdurrahman Wahid (Sulistya, 2024). MD dan HT mendapatkannya ketika masing-masing menjadi Panglima TNI pada 2013 dan 2017, kemudian FR pada 1999 ketika diangkat menjadi Wakil Panglima TNI (Erianto, 2020; Putra, 2015). Untuk PS, dirinya memang pernah diberikan gelar kehormatan berupa Jenderal (HOR), tetapi itu terjadi pada tahun 2024, ketika dirinya sudah dilantik menjadi Menhan dalam Kabinet Indonesia Maju. Jauh sebelum dilantik, PS diberhentikan dari kemiliteran pada 1998 dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal, setingkat dengan TAP yang pensiun dari militer pada 2019 dengan pangkat yang sama (Riana, 2019). Berbeda dengan keenam subjek, hanya AHY sendiri yang pensiun dari militer pada 2016 dengan pangkat Mayor (Infanteri) (Fathoni, 2024).

Diagram 1. Visualisasi Skor dari Keempat Dimensi Modal Politik



Sumber: diolah oleh peneliti, 2025.

Berdasarkan **Diagram 1**, dapat diketahui bahwa ketujuh subjek purnawirawan yang diteliti memiliki skor yang variatif dalam konteks dimensi modal manusia (kriteria pengukuran pengalaman politik dan pendidikan), modal sosial (kriteria pengukuran dukungan kelompok kolektif), modal ekonomi (kriteria pengukuran kekayaan pribadi), dan modal simbolik (kriteria pengukuran jabatan atau gelar dalam karier). Dari kelima kriteria pengukuran tersebut, Luhut yang dikodekan sebagai LBP memiliki skor total 9, dan Moeldoko dengan kode MD memiliki skor total 8. Masing-masing dari mereka memiliki skor total di atas nilai tengah. Untuk Prabowo dengan kode PS, Fachrul dengan kode FR, dan Agus dengan kode AHY masing-masing memiliki skor total setara, yaitu 3. Untuk Hadi dengan kode HT memiliki skor total 1 dan Terawan dengan kode TAP memiliki skor total 0. Dapat dilihat secara keseluruhan bahwa semua subjek penelitian tidak ada yang memiliki skor negatif atau di bawah 0.

Keterlibatan Berdasarkan Modal Politik dan Signifikansi Berbagai Dimensi Modal

Modal politik, menurut Casey, tidak hanya berasal dari sumber daya ekonomi atau kekayaan pribadi, tetapi juga merupakan kumpulan dari berbagai dimensi lain, seperti reputasi, jenjang karier, dan pendidikan, dan jaringan sosial yang melekat di individu (Casey, 2005). Dalam konteks ini, semua subjek penelitian memiliki skor positif dan atau minimal 0, yang berarti mereka memenuhi kemampuan dalam kepemilikan modal politik yang berdiri jamak untuk dikonversi menjadi sebuah jabatan politik. Menganut pada teori Casey yang menjabarkan politik sebagai “pasar”, kepunyaan sumber daya dalam diri subjek penelitian memenuhi syarat untuk penunjukkan mereka sebagai pejabat kabinet yang menjadi salah satu “pasar politik” (Casey, 2005).

Alasan Jokowi menunjuk purnawirawan TNI yang menjadi subjek penelitian untuk menjadi pejabat dalam kabinet dapat disebabkan oleh tiga alasan utama: pengalaman kepemimpinan dalam karier militer, memiliki kekuatan politik, dan memiliki sumber daya untuk menjadi daya tawar dari kekuatan eksternal (Indrawan, 2021). Ketiga alasan tersebut kemudian dapat diukur dan menjadi

sebuah konsekuensi logis bahwa Jokowi menunjuk purnawirawan TNI untuk terlibat dalam pemerintahannya disebabkan oleh sebuah kebutuhan dan mereka yang ditunjuk dapat memenuhi kebutuhan itu. Hal tersebut dapat dilihat oleh hasil penelitian ini bahwa akumulasi modal manusia, modal sosial, modal ekonomi, dan modal simbolik purnawirawan TNI tidak ada yang memiliki nilai negatif. Dapat ditafsirkan bahwa mereka mampu untuk memenuhi kebutuhan Jokowi.

Tabel 1.3 Koherensi Skor Akhir dengan Durasi Menjabat

Rank	Subjek Purnawirawan TNI	Awal Pelantikan (Oktober 2019)	Perombakan I (Desember 2020)	Perombakan II (April 2021)	Perombakan III (Juni 2022)	Perombakan IV (Juli 2023)	Perombakan V (Februari 2024)	Perombakan VI (Agustus 2024)	Akhir Kabinet (Oktober 2024)
1	LBP	MENKOMARVES							
2	MD	KEPALA STAF PRESIDEN							
3	PS	MENHAN							
4	FR	MENAG		X	X	X	X	X	X
5	AHY	X	X	X	X	X	MENTERI ATR/BPN		
6	HT	X	X	X	MENTERI ATR/BPN		MENKOPOLHUKAM		
7	TAP	MENKES		X	X	X	X	X	X

Sumber: diolah oleh peneliti, 2025

Penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara skor modal politik dengan lamanya masa jabatan purnawirawan TNI dalam Kabinet Indonesia Maju. Purnawirawan yang memiliki skor tertinggi seperti LBP dengan nilai 9 dan MD dengan nilai 8 berhasil bertahan dari awal pembentukan kabinet hingga berakhirnya pemerintahan tanpa mengalami reshuffle. Begitu pula dengan PS yang memiliki nilai 3 namun juga bertahan dari awal hingga akhir. Sebaliknya, purnawirawan dengan skor rendah seperti TAP (skor 0) hanya dapat bertahan hingga perombakan pertama pada Desember 2020, sedangkan FR (skor 3) diberhentikan pada perombakan yang sama meskipun memiliki skor setara dengan PS.

Namun, terdapat dua subjek yang menjadi outliers dalam pola ini, yaitu PS dan HT. Meskipun keduanya memiliki skor rendah, mereka memiliki masa jabatan yang relatif panjang dibandingkan subjek lain dengan skor serupa. Hal ini menunjukkan adanya dimensi modal lain yang tidak diukur dalam penelitian ini, seperti modal kelembagaan, modal budaya, dan modal moral. PS sebagai ketua partai yang populer memiliki keunggulan dalam modal kelembagaan, dibuktikan dengan perolehan suara Gerindra sebesar 12,57% atau sekitar 17 juta suara pada

Pemilu 2019. Sementara itu, HT memiliki keunggulan dalam modal budaya karena kedekatan personalnya dengan Jokowi yang terjalin sejak masa Jokowi menjadi Walikota Solo, ketika HT dipercaya menjadi Komandan Pangkalan Udara Adi Sumarmo dan kemudian menjadi sekretaris militer presiden.

Analisis terhadap dimensi modal politik menunjukkan bahwa modal ekonomi menjadi faktor paling signifikan dalam penelitian ini. Semua subjek penelitian memiliki kekayaan di atas Rp10 miliar, yang selaras dengan teori Casey bahwa kapital ekonomi mendominasi dari semua jenis dimensi kapital lainnya. Kekayaan pribadi ini tidak digunakan secara aktif untuk meraih jabatan politik, melainkan menjadi latar belakang kekuatan finansial yang menandakan potensi dan kemampuan seseorang. Dimensi kedua yang signifikan adalah modal manusia dalam aspek pendidikan, dimana hampir semua subjek penelitian kecuali PS memiliki jenjang pendidikan di atas sarjana. Pendidikan tinggi ini menunjukkan pentingnya kompetensi dan menjadi bagian dari akumulasi modal politik secara primum yang terbentuk jauh sebelum individu memasuki arena politik.

Modal simbolik berupa prestasi karier militer menempati urutan ketiga dalam signifikansi. Enam dari tujuh purnawirawan memiliki nilai positif dalam dimensi ini, menunjukkan bahwa Jokowi membutuhkan purnawirawan dengan karier profesional yang cakap. Kemampuan kepemimpinan yang telah teruji dalam organisasi militer menjadi bekal penting untuk memimpin organisasi sipil dalam kabinet. Di sisi lain, modal sosial berupa dukungan kelompok kolektif melalui partai politik kurang signifikan, terbukti dari HT dan TAP yang nonpartisan namun tetap dipilih menjadi pejabat kabinet. Hal ini sejalan dengan komposisi Kabinet Indonesia Maju dimana 40% menteri berasal dari kalangan ahli atau independen, lebih besar dibanding menteri berlatar belakang politisi (25,7%) dan pengusaha (34,2%). Dimensi terakhir yang paling tidak signifikan adalah pengalaman politik formal, dimana lima dari tujuh subjek memiliki skor negatif. Hal ini dapat dijelaskan karena pengalaman politik dapat disubstitusi dengan pengalaman kemiliteran yang secara historis sudah dekat dengan dunia politik.

Dalam konteks kontribusi terhadap kemenangan Pemilu 2019, terdapat perbedaan peran yang dimainkan oleh masing-masing purnawirawan. LBP, FR, dan MD aktif mendukung Jokowi melalui berbagai tim kemenangan seperti Cakra-19, Bravo 5, dan Tim Kampanye Nasional, yang mencerminkan kesamaan nilai dengan Jokowi sebagai bentuk modal budaya. Sebaliknya, PS dan AHY berasal dari kubu oposisi namun kemudian diajak bergabung sebagai bagian dari strategi rekonsiliasi elite pasca-pilpres. Pengangkatan PS dan AHY menunjukkan pragmatisme politik Jokowi untuk menjaga stabilitas pemerintahan dengan mengintegrasikan oposisi dan memperluas dukungan elite. Sementara itu, HT dan TAP yang masih menjadi tentara aktif saat Pilpres 2019 tidak dapat memberikan dukungan langsung karena harus menjaga netralitas TNI, namun mereka berkontribusi secara tidak langsung melalui popularitas dan kemampuan menjaga stabilitas institusi militer yang memperkuat citra Jokowi sebagai pemimpin yang didukung institusi strategis.

PENUTUP

Hasil dari penelitian ini menjawab bahwa purnawirawan TNI yang menduduki posisi sebagai pejabat Kabinet Indonesia Maju memiliki modal politik yang terbangun dari berbagai dimensi. Modal politik tersebut kemudian bertransformasi menjadi sebuah jabatan politik dengan signifikansi yang berbeda di tiap dimensi modal. Instrumen modal politik yang sudah diakumulasi oleh masing-masing purnawirawan TNI kemudian juga melengkapi kebutuhan Jokowi akan pejabat kabinet yang memiliki kemampuan cakap dan berlatar belakang dapat diandalkan. Apabila dirangkum dalam satu kalimat, penelitian ini menjawab fenomena keterlibatan purnawirawan TNI dalam Kabinet Indonesia Maju (pemerintahan Jokowi 2019–2024) sebagai pasar politik dengan didukung oleh modal politik mereka sebagai instrumen yang membantu kebutuhan Jokowi dalam meningkatkan *bargain* sebagai politisi sipil. Di samping itu juga, kebutuhan Jokowi untuk menciptakan stabilitas politik lewat aktor dari militer juga terpenuhi oleh beberapa subjek penelitian ini. Modal politik juga menjadi instrumen yang

berpengaruh terhadap rentang waktu menjabat di kabinet, walaupun tidak berlaku di semua subjek penelitian.

Implikasi dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa instrumen modal politik memiliki pengaruh dalam pelibatan menjadi aktor pemerintahan dalam kabinet. Walaupun demikian, tidak semua dimensi dari modal politik memiliki signifikansi yang ekuivalen. Terdapat urutan signifikansi yang menandakan bahwa tiap subjek penelitian memiliki keunggulannya masing-masing. Penelitian ini memberikan dukungan untuk melihat tren ke depan bahwa modal politik menjadi instrumen yang dapat dikuantifikasi untuk menganalisis fenomena keterlibatan purnawirawan TNI dalam kabinet pemerintahan. Kekurangan dari penelitian ini adalah tidak menggunakan semua dimensi pengukuran dalam teori yang diajukan oleh Casey karena ketiga dimensi lainnya hanya dapat diukur melalui pendekatan kuantitatif berbasis survei opini publik. Kekurangan lainnya adalah metode pengukuran yang digunakan dan aspek-aspek turunannya tidak sepenuhnya dapat menjelaskan realitas politik yang terjadi. Untuk penelitian selanjutnya yang masih termasuk ke dalam konteks modal politik, perlu adanya pengukuran melalui dimensi modal lain yang diukur secara kuantitatif agar keberlanjutan penelitian mengenai modal politik dapat menerjemahkan sebuah fenomena secara holistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adytyas, N. O., Yulianti, I., & Galuh, I. G. A. A. K. (2018, Juli). Legitimasi Partai Politik Gerindra: Modal dan Struktur Peluang Gerindra Merebut Legitimasi Parlemen. *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam*, 18(1), 119-131. <https://doi.org/10.19109/tamaddun.v18i1.2318>.
- Aminuddin, M. F. (2017). The Purnawirawan and Party Development in Post-Authoritarian Indonesia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 36(2), 3-30.
- Ananta, A., Arifin, E. N., & Suryadinata, L. (2005). *Emerging democracy in Indonesia*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Anggraini, A. P., & Hardiyanto, S. (2019, Oktober 23). Profil Dokter Terawan, Menteri Kesehatan Kabinet Indonesia Maju. *Kompas.com*. Diakses Februari 18, 2025, dari <https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/23/123806065/profil-dokter-terawan-menteri-kesehatan-kabinet-indonesia-maju>.
- Casey, K. L. (2005, Januari). *Defining Political Capital: A Reconsideration of Bourdieu's Interconvertibility Theory*. University of Missouri-St. Louis.

- Creswell, J.W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. (4th Edition). London: SAGE Publications.
- CNN Indonesia. (2019, Februari 14). Baca artikel CNN Indonesia "Ingin Unggul 70 Persen, Alasan Jokowi Terapkan 'Perang Total'". CNN Indonesia. Diakses Maret 11, 2025, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190214065712-32-369114/ingin-unggul-70-persen-alasan-jokowi-terapkan-perang-total>.
- Dwiastono, R. (2019, Mei 3). Di balik pertemuan Joko Widodo-Agus Harimurti Yudhoyono: 'Modal politik AHY'? BBC. Diakses Maret 11, 2025, dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48147815>.
- Erianto, D. (2020, Oktober 2). Fachrul Razi. Kompas. Diakses Februari 18, 2025, dari https://www.kompas.id/baca/tokoh/2020/10/02/fachrul-razi?loc=hard_paywall.
- _____. (2021, Februari 13). Jenderal TNI (Purn) Moeldoko. Kompaspedia. Diakses Februari 18, 2025, dari https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/tokoh/jenderal-tni-purn-moeldoko?track_source=kompaspedia-paywall.
- Evans, K. (2019, Oktober). Cabinet, Parties, and Everything: What you need to know about President Jokowi's new Advance Indonesia cabinet. AIC Backgrounder, (1), 1-9. <https://australiaindonesia.com/wp-content/uploads/2020/04/Cabinet-parties-and-everything-1.pdf>.
- Fajri, D. A., Nurita, D., Tjitra, A. T., & Riana, F. (2024, Oktober 22). Profil Terawan Agus Putranto, Eks Menkes yang Jadi Penasihat Khusus Presiden | tempo.co. Tempo.co. Diakses Februari 18, 2025, dari <https://www.tempo.co/politik/profil-terawan-agus-putranto-eks-menkes-yang-jadi-penasihat-khusus-presiden-1045783>.
- Fathoni, R. (2024, Februari 21). Arsip Foto "Kompas": Jejak Karier Agus Harimurti Yudhoyono dari Militer ke Politik. Kompas.com. Diakses Maret 3, 2025, dari <https://www.kompas.id/baca/foto/2024/02/21/arsip-foto-kompas-jejak-karier-agus-harimurti-yudhoyono-dari-militer-ke-politik>.
- Fitri, A. (2022, Desember). TNI Commander Replacement and Commitment to Strengthening TNI's Professionalism. Puslit DPR: Field of Political, Legal, and Security, XIV(23), 1-6. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIV-23-I-P3DI-Desember-2022-1947-EN.pdf.
- Greenpeace Indonesia, Jaringan Advokasi Tambang, Indonesia Corruption Watch, & Auriga Nusantara. (2018). COALRUPTION: Elite Politik dalam Pusaran Bisnis Batu Bara [Research Report]. Greenpeace Indonesia.
- Hasibuan, A. D., & Pasha, J. A. (2024, Januari). Institutionalization Of Political Parties: A Case Study Of The Party Democrats In The Era Of Agus Harimurti Yudhoyono's Leadership For The 2020-2022 Period. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 8(1), 730-747. 10.58258/jisip.v7i1.6026.
- Indrawan, M. R. (2021). *Purnawirawan dan Politik: Studi atas Keterlibatan Purnawirawan TNI dalam Pemerintahan Joko Widodo* [Skripsi]. UIN Syarif Hidayatullah.

- Kennedy, P. S. J. (2023). Human Resource Management: Military Leadership in the Indonesian Army. *International Journal of Multidisciplinary Research and Publications*, 6(5), 9-14.
- Khairurriqo. (2024). Military Reform: Informal Military Power in Indonesian Politics After 1998. *Riwayat*, 7(3), 898-909. 10.24815/jr.v7i3.39387.
- Kumar, R. (2014). *Research Methodology A Step-by-Step Guide for Beginners*. London: SAGE Publications Ltd.
- Mietzner, M. (2006). *The Politics of Military Reform in Post-Suharto Indonesia: Elite Conflict, Nationalism, and Institutional Resistance*. East-West Center Washington.
- _____. (2018). The Indonesian Armed Forces, Coalitional Presidentialism, and Democratization: From Praetorian Guard to Imagined Balance of Power. In R. W. Hefner (Ed.), *Routledge Handbook of Contemporary Indonesia* (pp. 140-149). Taylor & Francis Group.
- _____. (2020). Rival populisms and the democratic crisis in Indonesia: chauvinists, Islamists and technocrats. *Australian Journal of International Affairs*, 74(4), 420-438. <https://remote-lib.ui.ac.id:2075/10.1080/10357718.2020.1725426>.
- Muhtadi, B. (2015). Jokowi's First Year: A Weak President Caught between Reform and Oligarchic Politics. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 51(3), 349-368. 10.1080/00074918.2015.1110684.
- Nurita, D. (2018, Oktober 20). Beda Tim Purnawirawan TNI, Bravo 5 dan Cakra 19 di Kubu Jokowi. *Tempo*. Diakses Maret 10, 2025, dari <https://www.tempo.co/politik/beda-tim-purnawirawan-tni-bravo-5-dan-cakra-19-di-kubu-jokowi-805632>.
- _____. (2019, Juni 25). Berencana Jadi Ormas, Ini Sepak Terjang Bravo 5 di Pilpres 2019. *Tempo*. Diakses Maret 10, 2025, dari <https://www.tempo.co/politik/berencana-jadi-ormas-ini-sepak-terjang-bravo-5-di-pilpres-2019-733387>.
- Putra, E. P. (2015, Juli 27). Hadi Tjahjanto Promosi Jadi Sekretaris Militer Presiden Jokowi. *Republika*. Diakses Maret 3, 2025, dari <https://news.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/07/27/ns55yt334-hadi-tjahjanto-promosi-jadi-sekretaris-militer-presiden-jokowi?>
- Rastika, I. (2015, Agustus 12). Menko Polhukam Luhut Pandjaitan, dari Militer, Pengusaha, hingga Menteri. *Kompas.com*. Diakses Februari 18, 2025, dari <https://nasional.kompas.com/read/2015/08/12/14284891/Menko.Polhukam.Luhut.Pandjaitan.dari.Militer.Pengusaha.hingga.Menteri?page=all>.
- Ratnawati, & Romansa, D. (2020, Mei). Coattail Effect Strategy of Gerindra Party in 2019 Concurrent Election. *UNISCI Journal*, (53), 177-192. <https://www.unisci.es/wp-content/uploads/2020/05/UNISCIDP53-11RATNAWATIpdf.pdf>.
- Retaduari, E. A. (2016, Mei 30). Ini Susunan Pengurus DPP Golkar 2016-2019. *Detik News*. Diakses Februari 23, 2025, dari <https://news.detik.com/berita/d-3221198/ini-susunan-pengurus-dpp-golkar-2016-2019>
- Riana, F. (2019, November 8). Sebelum Dilantik Jadi Menteri, Terawan Dapat Pangkat Bintang Tiga. *Tempo.co*. Diakses Maret 3, 2025, dari

- <https://www.tempo.co/politik/sebelum-dilantik-jadi-menteri-terawan-dapat-pangkat-bintang-tiga-687000>.
- Rosa, N. (2024, Februari 21). Profil Pendidikan Hadi Tjahjanto, Eks Menteri ATR yang Dilantik Jokowi Jadi Menko Polhukam. *detikcom*. Diakses Februari 18, 2025, dari <https://www.detik.com/edu/edutainment/d-7203951/profil-pendidikan-hadi-tjahjanto-eks-menteri-atr-yang-dilantik-jokowi-jadi-menko-polhukam>.
- Rossi, M. A. (2014, Oktober). The impact of individual wealth on posterior political power. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 106, 469-480. 10.1016/j.jebo.2014.08.006.
- Saez, M. A. (2017). Political Career and Political Capital. *Convergencia*, 24(73), 1-17. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1405-14352017000100187&script=sci_arttext&tlng=en.
- Sambhi, N. (2021, Januari 22). Generals gaining ground: Civil-military relations and democracy in Indonesia. Brookings Institution. Diakses April 7, 2023, dari <https://www.brookings.edu/articles/generals-gaining-ground-civil-military-relations-and-democracy-in-indonesia/>.
- _____. (2023, Juni). Jokowi's Generals, Civilian Control, and the Power of the Panglima. *Journal of Global Strategic Studies*, 3(1), 21-42. 10.36859/jgss.v3i1.1614.
- Savitri, D. (2024, Februari 2). Riwayat Pendidikan Prabowo Subianto: SD-SMA di Luar Negeri-Kuliah AKABRI. *detikcom*. Diakses Februari 18, 2025, dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7173241/riwayat-pendidikan-prabowo-subianto-sd-sma-di-luar-negeri-kuliah-akabri>.
- Sebastian, L. C., Syailendra, E. A., & Marzuki, K. I. (2018, Juli). Civil-Military Relations in Indonesia after the Reform Period. *Asia Policy*, 13(3), 49-78. <https://www.jstor.org/stable/10.2307/26497789>.
- Senkyr, J. (2019, Mei). President Jokowi Wins the Election in Indonesia [Country Report]. Konrad-Adenauer-Stiftung. <https://www.kas.de/documents/252038/4520172/190613-Indonesia-Country+report-.pdf/513bbab3-1c85-1ef6-3bbd-1e4f591f1e03?version=1.1&t=1560412802105>.
- Setijadi, C., Simandjuntak, D., & Tomsa, D. (2016, Oktober 13). Candidates, Coalitions and Prospects for the 2017 Jakarta Gubernatorial Election (57th ed.) [Research Report]. ISEAS: Yushof Ishak Institute. Diakses Februari 18, 2025, dari https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/pdfs/ISEAS_Perspective_2016_57.pdf.
- Shamsudin, M. F. B., Ahmad, Z., & Mahadee, M. (2021, Desember). The Impact of Jokowi Administration on Indonesia's Sociopolitical Development. *Journal of Tianjin University Science and Technology*, 54(12), 34-51. 10.17605/OSF.IO/KNQFE.
- Soesilo, A. S. (2014, Juli). Jaringan Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia dalam Politik: Relasi Sipil–Militer Pasca Reformasi TNI. *Masyarakat, Jurnal Sosiologi*, 19(2), 1-36. 10.7454/MJS.v19i2.1245.

- Solihah, R., Witianti, S., & Ummah, M. (2019). Political Perspective of Indonesian Civil-Military Relation in the Reform Era. *Central European Journal of International and Security Studies*, 13(4), 34-50.
- Sulistya, A. R. (2024, Februari 28). SBY, Luhut, dan Hendropriyono Pernah Dapat Gelar Jenderal Kehormatan TNI Seperti Prabowo. *Tempo.co*. Diakses Maret 1, 2025, dari <https://www.tempo.co/politik/sby-luhut-dan-hendropriyono-pernah-dapat-gelar-jenderal-kehormatan-tni-seperti-prabowo-82630>.
- Sutrisno, E. D. (2018, Juli 3). Pamit ke Wiranto, Ini Jejak Singkat Moeldoko di Hanura. *detikNews*. Diakses Februari 23, 2025, dari <https://news.detik.com/berita/d-4095063/pamit-ke-wiranto-ini-jejak-singkat-moeldoko-di-hanura>.
- Syahban, G. P., & Hutasoit, M. (2020, Januari 9). Siapa Fachrul Razi, Menteri Agama untuk Republik Indonesia? *VOI*. Diakses Maret 11, 2025, dari <https://voi.id/berita/5240/siapa-fachrul-razi-menteri-agama-untuk-republik-indonesia>.
- Wasisto, A. (2021). Patterns of Cabinet Formation in Indonesia: The Case of Yudhoyono and Widodo's Cabinet. *Kajian*, 26(1), 21-34.
- Yanuaris, F., Alsadadrudi, & Auliani, P. A. (2021, Maret 13). Profil Moeldoko: Dari Anak Miskin, Reformasi TNI, Kepala Staf Presiden, sampai Arah 2024. *JEO Kompas.com*. Diakses Februari 18, 2025, dari <https://jeo.kompas.com/profil-moeldoko-dari-anak-miskin-reformasi-tni-kepala-staf-presiden-sampai-arah-2024>.
- Yogaswara, A. S., Ahman, E., Disman, & Nugraha. (2023, Agustus). Military Leadership and Leader Performance: The Mediating Role of Organizational Military Behavior. *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*, 16(2), 107-116.
- Yuniarto, T. (2022, Februari 22). Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). *Kompas*. Diakses Februari 23, 2025, dari https://www.kompas.id/baca/lembaga/2022/02/22/partai-hati-nurani-rakyat-hanura?open_from=Search_Result_Page.
- Xu, L. (2021, Juni). The Transition of Civil-Military Relations in Indonesia and Its Implication for Myanmar [Policy Paper]. The Stimson Center.